

BAB II TALAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Telaah Pustaka

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno Agoes (2010:2) pengertian akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Ilyahul Ulum (2004:2) :

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Abdul Halim (2001:5) :

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang antara lain, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Sefni Kasmita (2013:13), Bidang Akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu :

1. Akuntansi Pemerintahan 11

Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga

pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.

2. Akuntansi Nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau disebut juga akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi.

3. Akuntansi Perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba. Secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan.

b. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:25) :

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat disajikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pada prinsipnya pengertian keuangan Negara sama dengan keuangan daerah, perbedaan antara keuangan Negara dengan keuangan daerah adalah keuangan Negara meliputi semua aspek kekayaan Negara, sedangkan keuangan daerah hanya meliputi pengelolaan keuangan suatu daerah saja. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah.

Menurut Abdul Halim (2012:43)

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi yang

memerlukan.

Dari pengertian di atas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber–sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain–lain. Dan atau hak untuk menerima sumber–sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan–tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, insfrakstruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diartikan sebagai sistem yang mengelola semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah, yang menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 232 ayat 3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangkat pertanggungjawaban pelakasanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi ; (1) Laporan Realisasi Anggaran (2) Neraca (3) Laporan Arus Kas (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi ; (1) Laporan Realisasi Anggaran (2) Neraca (3) Catatan Atas

Laporan Keuangan.

c. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah menurut Mardiasmo (2002:14) adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan pengguna dan publik.

d. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

1) Sistem Pencatatan

Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan menurut Abdul Halim (2007:44), yaitu:

a) *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* disebut juga dengan sistem pencatatan tata buku tanggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b) *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c) *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

2) Dasar Pengakuan

Dasar pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi. Menurut Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dasar akuntansi terbagi empat, yaitu:

a) Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.

- b) Basis Akrua (*accual basis*)
Basis akrua adalah suatu metode penandingan antara pendapatan dengan beban, pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha.
- c) Basis Kas Modifikasian (*modified accual basis*)
Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrua.
- d) Basis Akrua Modifikasian (*modified accual basis*)
Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrua dilandasi pertimbangan kepraktisan.

e. Tujuan Dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah menurut

Abdul Halim (2004:26) adalah:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek untuk pemerintah.
- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksikan kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasi.
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi:
 - a) Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktifitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan unit pemerintah lain.
 - b) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktifitas dan fungsi tertentu dalam unit pemerintahan.
 - c) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktifitas, dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*).

f. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap

pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi:

1. BPK (Badan Pengawasan Keuangan) adalah badan yang melakukan pengawas atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Investor, Kreditor, dan Donatur adalah badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam Negeri maupun luar Negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
3. Analisis Ekonomi dan Pemerhatian Pemerintah Daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Rakyat adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian aktivitas pemerintah khusus yang menerima produk dan jasa pemerintah daerah.
5. Pemerintah Pusat memerlukan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No.108 Tahun 2000)
6. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota). Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman. (Sefni Kasmita,2013:20)

g. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pasal 1 poin 8, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Transaksi-transaksi dalam siklus akuntansi terdiri atas:

1. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya dengan buku/bukti/dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

2. Bukti Transaksi

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir

tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir-formulir yang diterima dari luar organisasi.

3. Jurnal

Jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

Untuk aktiva dibuat jurnal *Colloary* yaitu yang dibuat saat perolehan aktiva tetap.

4. Posting ke Buku Besar

Setelah dilakukan jurnal kemudian yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting.

Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, bertujuan mencatat secara terpisah atau pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang dan ekuitas dana.

5. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas, sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu.

Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan dan sebagainya.

6. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu.

7. Jurnal Penyesuaian

Pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu. Pendapatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu telah diserahkan kepada konsumen meskipun kasnya belum diterima. Sebaliknya, jika kas telah diterima sebelum jasa diserahkan kepada konsumen, maka penerimaan kas tidak boleh diakui sebagai pendapatan periode sekarang.

Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut:

- a. Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
- b. Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi.
- c. Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca, sebagian nilai aktiva awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
- d. Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca. Untuk keempat tujuan pembuatan jurnal penyesuaian tersebut, ada beberapa transaksi yang dilakukan penyesuaian, meliputi:

1. Bahan Habis Pakai

Bahan habis pakai merupakan aktiva entitas yang dimaksudkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Bahan habis pakai bersifat habis pakai yaitu hanya bisa digunakan sekali dalam waktu singkat dengan nilai satuan kecil.

2. Belanja Dibayar di Muka

Biasanya sewa dibayar pada awal atau sebelum waktu periode sewa yang disepakati. Jika sewa dimaksudkan untuk jangka panjang waktu Sembilan bulan misalnya maka pembayaran yang dilakukan pada awal atau sebelum bulan pertama. Dengan

demikian, sebagai aktiva, sewa diharapkan memberi manfaat ekonomi pada masa yang akan datang.

3. Pemakaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan kekayaan entitas yang dimaksudkan untuk dipakai dalam jangka panjang dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Pada saat diperoleh, aktiva tetap dicatat sebesar harga pokoknya. Selama masa pemakaian, aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan. Besarnya biaya penyusutan dipengaruhi oleh harga perolehan, umur ekonomis atau masa manfaat dan nilai sisa aktiva. Pencatatan yang dilakukan dalam melakukan penyusutan adalah dengan mendebet biaya penyusutan dan mengkreditkan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah perkiraan lawan dari perkiraan aktiva tetap. Selisih antara nilai aktiva dengan akumulasi penyusutan disebut nilai buku.

8. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah memposting ke rekening buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Saldo-saldo rekening yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya jurnal penutup, rekening yang tetap ada adalah rekening pemanen yaitu aset, hutang dan ekuitas dana.

Untuk menihilkan rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan digunakan rumus

sebagai berikut:

- a. Karena pendapatan terletak pada sisi kredit maka untuk menihilkannya harus didebet, demikian halnya penerimaan pembiayaan.
- b. Karena belanja terletak disisi debit maka untuk menihilkannya harus dikredit, demikian halnya penjualan pembiayaan.
- c. Selisih antara pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan merupakan silpa.
- d. Karena APBD kita menganut surplus dan defisit maka posisi silpa kemungkinan debit dan kemungkinan kredit.

Berdasarkan rumus tersebut jurnal penutup yang dibuat

Pendapatan	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Silpa	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Silpa	xxx

9. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah. Informasi ini digunakan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Dalam neraca akan tergambar posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

10. Neraca Saldo Setelah Penutupan

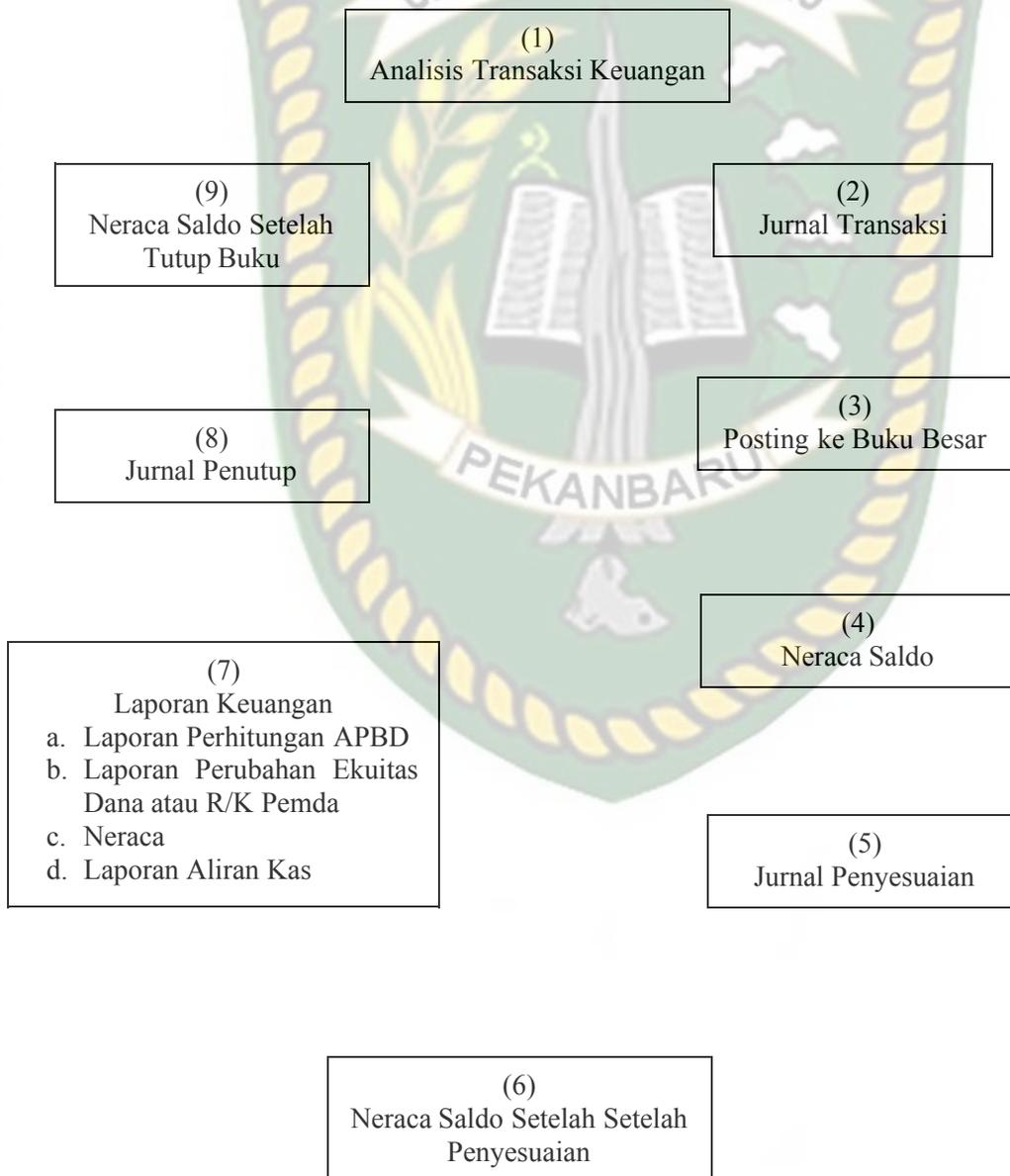
Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah saldo penutupan. Neraca saldo penutupan berisi saldo rekening–rekening setelah jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan sub–bagian dari rekening ekuitas dana, sehingga pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo–saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas.

Rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal)

sedangkan rekening aset, hutang dan ekuitas dana disebut rekening permanen (real) karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka-angka rekening tersebut harus dinihilkan melalui jurnal penutup. (Abdul Halim, 2007:56)

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim (2004;42) dapat digambarkan sebagai berikut :

GambarII.1
Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi yang lain.

i. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Laporan Keuangan Perusahaan

Menurut Mardiasmo (2002;173) menyebutkan antara perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta ialah sebagai berikut :

a. Fokus dan lingkup laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik berfokus pada masalah financial dan politik, sehingga sektor publik diukur berdasarkan aspek financial dan non financial, sedangkan laporan

keuangan sektor swasta menitik beratkan kinerja pada aspek keuangan.

b. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor public ditujukan pada pihak legislative / parlemen dan masyarakat sedangkan pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditujukan kepada para pemegang saham kreditor.

c. Orientasi laporan keuangan

Laporan keuangan sektor public lebih berorientasi pada jangka panjang karena terikat dengan konsep politik, dan kenegaraan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta orientasinya jangka panjang.

d. Aturan laporan

Laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh standar akuntansi publik (SAP) sedangkan laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan (SAK).

e. Pihak pemeriksa

Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh BPK sedangkan sektor swasta diperiksa oleh auditor yang independent.

f. Pengguna dasar akuntansi

Pengguna dasar akuntansi akrual disektor swasta telah berjalan lama, sedangkan di pemerintahan sebagian besar masih menggunakan dasar akuntansi kas.

j. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah telah menetapkan format-format jurnal umum, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. (Abdul Halim, 68:2007)

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (6) juga disebutkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas laporan keuangan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi selain aset.

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD.

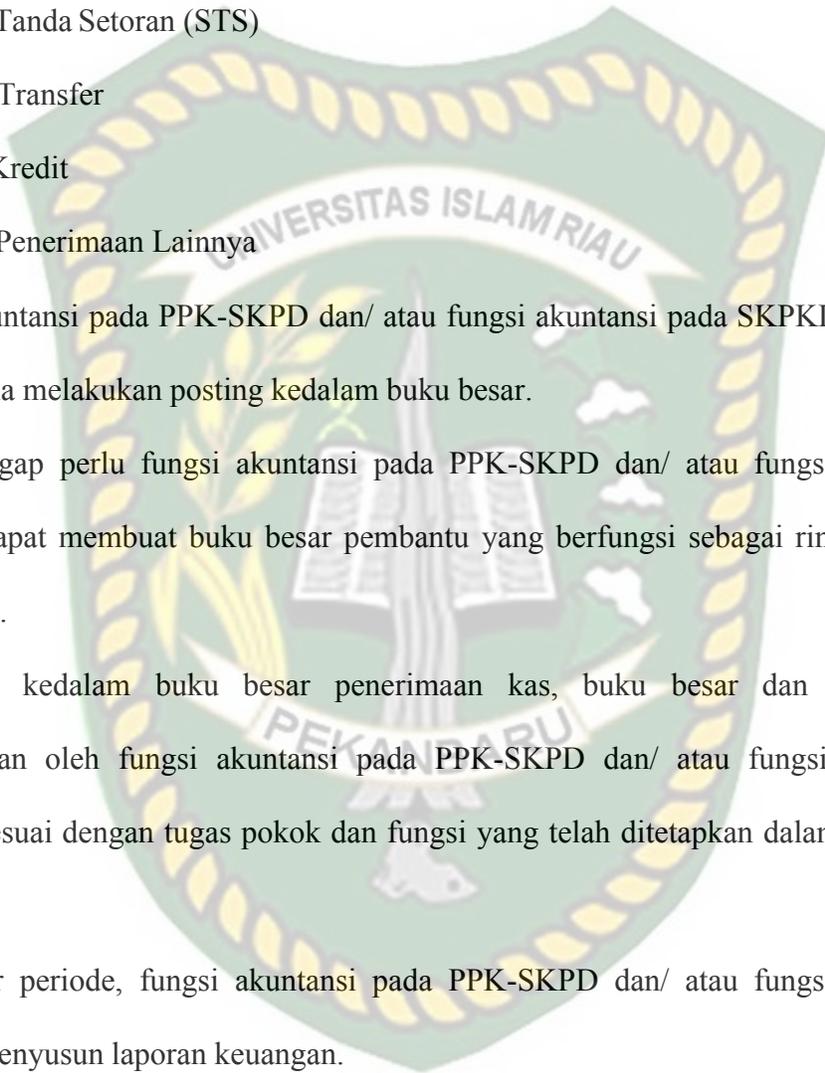
Prosedur akuntansi penerimaan kas :

- 1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

- 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat kedalam buku jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.
- 3) Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain :
 - a) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
 - b) Surat Tanda Setoran (STS)
 - c) Bukti Transfer
 - d) Nota Kredit
 - e) Buku Penerimaan Lainnya
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting kedalam buku besar.
- 5) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.
- 6) Pencatatan kedalam buku besar penerimaan kas, buku besar dan buku pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- 7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksana APBD yang



berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/ atau SKPKD.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas :

- 1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
 - 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat kedalam buku jurnal pengeluaran kas, disertai rekening-lawan asal pengeluaran kas tersebut.
 - 3) Bukti transaksi pengeluaran kas mencakup antara lain :
 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b) Bukti Transfer
 - c) Nota Kredit
 - d) Bukti Pengeluaran Lainnya
 - 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting kedalam buku besar.
 - 5) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.
 - 6) Pencatatan kedalam buku besar pengeluaran kas, buku besar dan buku pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
 - 7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.
- c. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/ atau kejadian selain kas pada SKPD dan/ atau SKPKD.

Prosedur akuntansi selain kas adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Transaksi dan/ atau kejadian selain kas, antara lain :
 - a) Pengesahan pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dana
 - b) Koreksi kesalahan pencatatan
 - c) Penerimaan hibah/ donasi selain kas
 - d) Pembelian secara kredit
 - e) Retur pembelian kredit
 - f) Pelepasan hak atas aset/ barang milik daerah tanpa konsekuensi kas, dan
 - g) Penerimaan aset tetap/ barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
- 3) Bukti transaksi dan/ atau kejadian selain kas, antara lain :
 - a) Berita acara penerimaan barang
 - b) Surat keputusan penghapusan barang
 - c) Surat pengiriman barang
 - d) Surat keputusan mutasi barang
 - e) Berita acara pemusnahan barang
 - f) Berita acara serah terima barang
 - g) Berita acara penilaian

- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/ atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
- 5) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum.
- 6) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- 7) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- 8) Pencatatan ke dalam buku jurnal umum dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Prosedur akuntansi aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/ atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/ atau SKPKD.

Prosedur akuntansi aset, antara lain :

- 1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

- 2) Bukti transaksi dan/ atau kejadian akuntansi aset terdiri dari :
 - a) Berita acara penerimaan barang
 - b) Surat keputusan penghapusan barang
 - c) Surat pengiriman barang
 - d) Surat keputusan mutasi barang
 - e) Berita acara pemusnahan barang
 - f) Berita acara serah terima barang
 - g) Berita acara penilaian
 - h) Berita acara penyelesaian pekerjaan
- 3) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/ atau kejadian melakukan pencatatan kebukti memorial.
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat kedalam buku jurnal umum.
- 5) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting kebuku besar.
- 6) Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu

masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

I. Kebijakan Akuntansi

Penerapan Kebijakan Akuntansi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2015 Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, termasuk didalamnya penerimaan yang masih berada di rekening penerimaan maupun penerimaan kas/setara kas yang masih berada dalam penguasaan bendahara penerimaan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Aset Non Lancar

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada

penyedia jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

(1) Kewajiban Jangka Pendek

(2) Kewajiban Jangka Panjang

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

7. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

N. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah

2. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku pada Pemerintah Daerah”**.

